

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR JUNI 2012

Minggu-minggu akhir Juni 2012 Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012, Dewan tetap fokus pada pelaksanaan fungsi bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Berikut ringkasan kegiatan Dewan minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Setelah selesainya Rapat Panja RKP tahun 2013 dan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2013, Badan Anggaran melanjutkan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN 2013 dengan rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah yang dimulai dari tanggal 19 Juni 2012.

Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2013, yang meliputi: (1) Kebijakan Belanja Pegawai; (2) Kebijakan Belanja Barang; (3) Kebijakan Belanja Modal; (4) Kebijakan Pembayaran Bunga Utang; (5) Kebijakan Subsidi Energi dan Non-Energi; (6) Kebijakan Bantuan Sosial; (7) Kebijakan Belanja Lain-lain; serta (8) Arah dan Kebijakan Belanja Kementerian/ Lembaga Negara Tahun 2013.

Sedangkan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah membahas Kebijakan Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2013, yang meliputi antara lain: (1) Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2013; (2) Kebijakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pelaksanaan fungsi legislasi, pada minggu-minggu ini, semua Komisi, Pansus dan Baleg, melanjutkan pembahasan RUU Prioritas, baik yang akan diselesaikan pada masa sidang ini maupun yang masih berlanjut untuk masa sidang yang akan datang. Untuk Komisi I dan Komisi VIII akan menyelesaikan RUU Konvensi yang ditargetkan memasuki pembicaraan tingkat II.

Komisi I telah membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU ten-



gung Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan. Kedua RUU ini akan dijadwalkan dalam pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan) pada Rapur tanggal 26 Juni.

Komisi VIII DPR-RI telah menyelesaikan 2 RUU Konvensi pada tanggal 6 dan 7 Juni, yaitu RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan RUU tentang protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Kedua RUU ini telah

diselesaikan dalam pembicaraan tingkat I bersama Pemerintah. Kedua RUU ini akan memasuki pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan) pada Rapur tanggal 26 Juni.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Telah dilakukan Rapat Tim Pengawas Century dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 13 Juni 2012. Dalam rapat tersebut, Pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok pembicaraan, dan pimpinan KPK menyampaikan laporan perkembangan penyelidikan kasus Bank Century sampai dengan tanggal 12 Juli 2012. Setelah mendengarkan laporan dari KPK, maka beberapa anggota Tim menyampaikan beberapa hal antara lain, memberikan apresiasi kepada KPK yang terus berupaya menuntaskan kasus Bank Century. Tim pengawas mengharapkan agar KPK melakukan langkah-langkah strategis yang mendukung penyelidikan tindak pidana korupsi pada Bank Century dengan menyelidiki lebih lanjut data yang sudah diserahkan oleh Tim Pengawas dan BPK kepada KPK. Kesimpulan rapat ini adalah, Tim Pengawas berpendapat bahwa progres yang disampaikan KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan, KPK perlu melihat jadwal

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

yang ada dalam penyelesaian kasus Bank Century terutama dalam aspek penegakan hukum.

Rapat Tim Pengawas Century tanggal 20 Juni dengan Tim Pengembalian Aset, menyimpulkan bahwa Tim Pengawas mendorong Tim Pengembalian Aset untuk melakukan segala upaya agar aset yang dibekukan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri segera dicairkan/di-rampas untuk menutup kerugian negara. Khusus aset yang berada di dalam negeri, Tim Pengawas mendorong agar Tim Pengembalian Aset segera melakukan langkah-langkah hukum terhadap aset-aset yang terkait dengan Bank Century. Kasus Bank Century telah menimbulkan kerugian pada nasabah Antaboga Delta Sekuritas, oleh karena itu hasil seluruh perampasan aset agar diprioritaskan untuk membayar ganti rugi nasabah Antaboga Delta Sekuritas.

Komisi VII telah melakukan Raker pada tanggal 12 Juni dengan Menteri ESDM dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RUU APBN TA. 2013. Kesimpulannya adalah, Komisi VII dapat memahami usulan dari Pemerintah/Menteri ESDM tentang Asumsi Dasar Komponen Subsidi Listrik TA. 2013 yang terdiri dari (lihat tabel):

NO.	Uraian	Satuan	2012 APBN-P	2013 Prognosa
1.	Susut jaringan (losses)	%	8,5	8,5
2.	BPP tenaga Listrik	RP/KWh	1,152	1.150-1,204
3.	Margin Usaha.	%	7	7

Kesimpulan tersebut diberi beberapa catatan, antara lain perlunya penyampaian alasan dalam menentukan harga energi primer dan menyampaikan laporan kerugian pengelolaan FTP 10.000 MW tahap I. Penyampaian penjelasan ter-

kait kerugian negara pada 8 unit pembangkit yang menggunakan dua fliring berdasarkan hasil audit BPK-RI untuk tujuan tertentu.

Pada tanggal 11 Juni Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM dengan agenda pembahasan dan penetapan asumsi dasar ICP, lifting minyak bumi, LPG bersubsidi, subsidi BBM, Alpha dan volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU APBN tahun anggaran 2013. Kesimpulannya: [1] harga minyak Indonesia (ICP) sebesar 95-120 US\$ per barel, [2] lifting minyak bumi sebesar 890-930 ribu BOPD; [3] lifting gas bumi sebesar 1.325-1.390 ribu BOEPD; [4] lifting migas sebesar 2.215-2.320 ribu BOEPD. Dengan beberapa catatan.

Penetapan Dewan Komisiner OJK

Pada Rapat Paripurna tanggal 26 Juni, akan dilaporkan oleh Pimpinan Komisi XI mengenai hasil pembahasan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Rapat tanggal 26 Juni tersebut, akan diambil keputusan mengenai usulan jabatan calon ketua OJK dari 2 orang calon yang telah menjalani *fit and proper test* dan 6 orang anggota OJK dari 13 calon yang juga telah menjalani *fit and proper test* Komisi XI sebagai anggota Dewan Komisiner OJK.

KEGIATAN ANTAR-PARLEMEN

Pada Kamis, 21 Juni 2012, telah dilakukan seminar dengan tema *AIPA to Enhance the ASEAN Transformation Into a Solid Community*. Seminar ini diadakan dalam rangka mempersiapkan



Peserta seminar AIPA di Gedung DPR RI



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat pidato pembukaan seminar AIPA

kan sidang Executive Committee AIPA di Jogjakarta, bulan Juli 2012, dan Sidang *The Ninth Meeting of The AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace ke-9*. Dalam kata pembukaan seminar yang dihadiri oleh beberapa pembicara yaitu Bagas Hapsoro Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN bidang Masyarakat dan Keorganisasian, Foster Gultom Sekretaris Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Kemlu RI, Prof. Hikmawanto Juwana, SH, LLM, PHD, guru besar Universitas Indonesia, Ketua DPR menyampaikan pesan dalam pidatonya sebagai berikut:

ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang semula perhimpunan ini bernama *ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO)*, berdiri tahun 1977, yaitu 10 tahun setelah ASEAN berdiri. Pada usianya menjelang ke-35 tahun sekarang ini, selaku Presiden AIPA, Ketua DPR mengamati bahwa, kerjasama yang dibangun semakin baik, bahkan diperluas dengan makin bertambahnya parlemen mitra-dialog (*observer*), yang ikut mewarnai kiprah AIPA dalam setiap Sidang Umumnya. Ini tentu sangat menggembirakan bagi parlemen negara-negara pemrakarsa berdirinya perhimpunan ini, termasuk DPR-RI.

Sejak kelahirannya, perhimpunan parlemen anggota ASEAN, telah menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui program aktifitas yang diarahkan bagi penguatan dan percepatan pencapaian tujuan ASEAN. Pada akhir tahun 2008, ASEAN meluncurkan *The ASEAN Charter*, yang menetapkan bahwa *ASEAN Community* akan terbentuk tahun 2015 dengan membangun 3 pilar yaitu: *ASEAN Political Community*, *ASEAN Economy Community*, dan *ASEAN Cultural Community*.

AIPA sebagai representasi rakyat ASEAN memberikan dukungan penuh bagi terbentuknya ASEAN Charter ini. Hal ini nampak dari pelbagai agenda yang dibahas dalam sidang-sidang umum AIPA melalui komisi-komisi politik, ekonomi, sosial, termasuk WAIPA. AIPA bersama ASEAN mengukung tanggungjawab untuk ikut serta secara aktif membawa ASEAN sebagai *a people-centered community*. Tentu saja, visi ini memerlukan keterlibatan, tidak hanya Pemerintah,

tetapi juga parlemen dan seluruh potensi bangsa-bangsa di kawasan ASEAN.

Dalam memperkuat eksistensi AIPA terhadap ASEAN, beberapa tahun berjalan ini telah dilakukan pertemuan formal pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Pada forum ini, telah diundang Presiden AIPA dan Ketua-Ketua Parlemen untuk berdialog dengan pimpinan negara ASEAN, membahas isu-isu penting kawasan.

Selanjutnya, Ketua DPR juga mengatakan bahwa DPR-RI dalam kepemimpinannya sebagai Presiden AIPA tahun 2011-2012, berupaya mewujudkan visi, yakni untuk memperbesar kontribusi AIPA dalam membangun *ASEAN Community* tahun 2015; memupuk hubungan AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, koperatif dan efektif, serta mempererat hubungan AIPA dengan masyarakat ASEAN.

Adapun misi yang dijalankan, untuk memberikan kepemimpinan yang kuat agar bisa memperjelas arah tujuan AIPA sebagai organisasi parlemen regional, meningkatkan hubungan antar masyarakat ASEAN demi memupuk identitas ASEAN bersama yang saling menghormati, membentuk sistem untuk mendorong implementasi yang maksimal dari resolusi-resolusi yang telah diadopsi; menjalin komunikasi yang efektif dan membentuk mekanisme kerja yang baik antara AIPA dan ASEAN.

PELANTIKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN

Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Husnan Bey Fananie sebagai anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini menggantikan koleganya H. Amin Suparmin yang menyatakan mengundurkan diri. Sementara, pada akhir bulan Mei telah dilakukan pelantikan PAW Dr. Saidi Butar Butar MM, sebagai anggota DPR mewakili Partai Demokrat Dapil Sumatra Utara II menggantikan Drs. H. Amrun Daulay, MM.



Suasana rapat kerja Pansus Century yang dipimpin oleh Wakil Ketua Priyo Budi Santoso



Ketua DPR Marzuki Alie melantik anggota PAW Dr. Saidi Butar-butar dari Fraksi Demokrat menggantikan Drs. Amrun Daulay, MM

Komisi X DPR Kecam Klaim Malaysia Terhadap Tari Tor-Tor dan Gordan Sambilan

Mayoritas anggota Komisi X DPR mengecam klaim Malaysia terhadap tarian Tor-Tor dan Gordan Sambilan. Tarian itu merupakan milik kebudayaan Bangsa Indonesia dan bukan kebudayaan Malaysia.



Suasana rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

“Ini sangat tidak tepat klaim Malaysia terhadap tarian asli budaya Indonesia,” tegas Anggota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti, rapat tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi X DPR Senayan Jakarta, Rabu (20/6) siang.

Parlindungan menambahkan, Tari Tor-Tor itu merupakan hasil kreasi, inisiatif dan inovasi orang Batak. “Tari ini merupakan tarian yang sangat sakral, ada Tor-Tor ada istiadat dan masih ada lagi Tor-Tor yang lainnya,”ujarnya.

Parlindungan Hutabarat menegaskan, Tari Tor-Tor yang diklaim Malaysia itu bukan Tor-Tor milik Malaysia, karena Tor-Tor itu memang budaya asli orang Batak bukan milik suku lain.

Dia juga menambahkan, dengan adanya kasus-kasus yang lain membuktikan lemahnya koordinasi, dokumentasi. “maka banyak hasil-hasil budaya kita ribuan tahun yang lalu seperti Majapahit, Sriwijaya akhirnya tidak jelas

bukti otentiknya hanya katanya, jelas Parlindungan.

Parlindungan juga mengatakan masih banyak kelemahan-kelemahan dari bangsa kita seperti pemeliharaan aset kebudayaan, kedepan perlu diperkuat agar aset-aset kita itu tidak diklaim oleh orang lain

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan, budaya bersifat dinamis karena mobilitas pendukungnya, tetapi budaya adalah prinsip dan harga diri jika menyangkut identitas. “Wajar dan sah-sah saja jika kemudian Malaysia mengembangkan dan menawarkan potensi budaya Mandailing atau budaya Indonesia yang lain yang ada di Malaysia,”paparnya

Wiendu juga mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada etnis Mandaling yang tinggal dan bermukim serta memiliki kewarganegaraan Malaysia (versi Perhimpunan anak-anak Mandailing di Kuala Lumpur mencatat kehadiran etnis Mandailing di wilayah Malaysia sejak tahun 1800 M).



Anggota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat

Wamen Dikbud Wiendu Nuryanti menegaskan, Malaysia wajib menyatakan Tari Tor-Tor yang akan didaftarkan itu berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Hal tersebut ditekankan karena sejatinya Tari Tor-Tor adalah milik semua warga Batak Indonesia.

Wiendu menekankan, jika Pemerintah Malaysia (melalui etnis mandailing yang berkewarganegaraan Malaysia) berhak mengembangkan budaya Mandailing. Tetapi tidak bisa menganggap budaya Mandailing sebagai hak milik Malaysia. Karena asal muasal dan sejarahnya merupakan milik masyarakat, Sumatera utara, Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Luar Negeri, disampaikan bahwa sudah ada pernyataan lisan dari pihak Pemerintah Malaysia dalam hal ini Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan yang akan mengirim Nota Penjelasan kepada Pemerintah RI melalui Kemlu paling lambat hari Rabu, 20 Juni 2012. (spy)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi III Pertanyakan Kosongnya Beberapa Jabatan di KPK

Komisi III DPR menyoroti lowongnya kursi beberapa jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bahkan ada yang sudah lebih dari satu tahun belum diisi.



Pimpinan rapat Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat dengan Pimpinan KPK



Jajaran Pimpinan KPK saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja institusi pembantas korupsi ini.

“Konsen kami kalau lama kosong dan orang merangkap terus jabatannya, saya sebagai manusia biasa memahami tingkat overload orang, ti-

dak mungkin orang dalam 1 tahun memegang 2 atau jabatan dengan load tinggi. Saya khawatir kalau sudah overload proses akuntabilitasnya menurun,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pim-

pinan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/12)

Hal senada disampaikan anggota Komisi III dari FP Gerindra Desmon J Mahesa. Ia meminta pimpinan KPK menjelaskan berlarutnya proses pergantian Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan serta Direktur Penyidikan dan Direktur Gratifikasi. Baginya macetnya pergantian mesin utama KPK ini menunjukkan indikasi ada sesuatu yang tidak beres.

Dalam penjelasannya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto menyebut proses rekrutmen para pejabat di institusi yang dipimpinnya dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk lewat proses tender yang transparan. KPK dalam hal ini hanya menyerahkan daftar kriteria pejabat yang diperlukan dan sejauh ini belum ada kandidat yang dapat memenuhinya.

“Deputi Penindakan misalnya proses sudah dilakukan sejak bulan Mei 2011 dengan 10 kandidat tetapi semua tidak berhasil lolos. Kemudian 2012 dimulai lagi proses pengujian yang diikuti 32 kandidat, kita harapkan pada awal atau akhir Juli ini kita sudah menemukan orangnya,” jelasnya.

Ia memaparkan tidak mudah menemukan pejabat yang sesuai dengan kriteria dan tantangan yang dihadapi KPK saat ini. Namun pendiri LSM Kontras ini berkeyakinan paling lambat akhir tahun ini seluruh jabatan yang kosong di KPK sudah dapat diisi.

RDP Komisi III dengan Pimpinan KPK berlangsung cukup panjang sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Pimpinan sidang Nasir Djamil memutuskan untuk melanjutkan rapat Kamis malam (21/6) dengan agenda mendengarkan jawaban pimpinan KPK terhadap beberapa pertanyaan anggota, dilanjutkan pengambilan kesimpulan. (iky) foto:wy/parle

Ketua DPR RI Kunker ke Malaysia, Singapura, dan Myanmar

Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) melakukan Kunjungan Kerja ke Malaysia, Singapura dan Myanmar, guna mempercepat pencapaian tujuan AIPA, pada tanggal 24 – 30 Juni 2012



“Kita akan mempercepat tujuan Asean komunitas 2015 seperti tiga pilar, politik, ekonomi dan sosial budaya. prinsipnya kita mendukung Asean chartered melalui sidang-sidang di AIPA dan WAIPA. AIPA mengusung tanggung jawab pro aktif bawa asean menjadi people community jadi tidak hanya Parlemen, tapi pemerintahpun harus pro aktif,” papar Marzuki Alie saat membuka Seminar yang bertajuk AIPA : Enchancing The ASEAN Transformation into a solid community, di operation Room, Kamis, (21/6).

Presiden AIPA pada kunjungannya di Negara Malaysia direncanakan melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat H.E. Yang Amat Berbahagia YB Tan Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia, Ketua Dewan Negara H.E. YB Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Nika Ujang, dan Perdana Menteri Malaysia H.E. Datuk Sei Najib Razak.

Singapura, Marzukie Alie akan bertemu dengan ketua Parlemen Singapura, sedangkan Negara Myanmar, akan bertemu dengan Presiden U Thein Sein, Ketua Parlemen Pyithu Hluttaw, dan Ketua Senate Amyotha Hluttaw.

Marzuki Alie mengungkapkan bahwa ASEAN saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti meyakinkan masyarakat atas urgensi keberadaan ASEAN, kemudian masalah perbatasan negara-negara anggota ASEAN, adanya



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat pidato pembukaan seminar AIPA di Gedung Operation Room



Suasana seminar AIPA di Gedung Operation Room
mika internal dari dalam negeri negara-negara ASEAN dan tarikan kepentingan antar negara Anggota ASEAN maupun eksternal yang berpotensi menghambat laju kebersamaan ASEAN. “AIPA juga ingin menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik diantara anggota ASEAN,” tegas Marzuki Alie. (as)foto: wy

kesenjangan ekonomi dan perbedaan tingkat pembangunan antar negara-negara ASEAN, dan menjaga stabilitas di Kawasan.

untuk itu, AIPA berupaya memperkuat perannya menuju integrasi ASEAN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, seperti dengan membuat regulasi yang akomodatif, menjaga dina-

Komisi I DPR RI Segera Revisi UU Veteran

Komisi I DPR RI segera merevisi UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI. Revisi tersebut direncanakan akan merubah dan menambahkan kriteria veteran, Hak-hak veteran, dan ketentuan sanksi.



Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin menjawab pertanyaan wartawan mengenai revisi UU Veteran

Hal itu mengemuka saat RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin, dengan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan serta Asisten TNI AD, AL, dan AU, membahas upaya negara untuk memberdayakan veteran RI agar tetap sebagai komponen pendukung yang tangguh bagi keselamatan NKRI, Senin (11/6).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin mengatakan, UU veteran nantinya perlu disusun penambahan kriteria veteran, yang belum masuk dalam UU no 7 tahun 1967, misalnya ada veteran pembela Trikora, veteran pembela Dwikora, veteran pembela Seroja, dan veteran pembela lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengenai veteran pembela Seroja, terangya, harus ada rincian yang jelas, karena tidak semua prajurit yang bertugas disana mendapatkan klasifikasi veteran, "Kalau tidak salah, hanya sampai Juni tahun 1976 ketika integrasi secara resmi Timor Timur ke Wilayah NKRI," tegasnya.

Selain itu, TB. Hasanuddin sepen-

dapat bahwa veteran mendapat hak-hak dari Negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden, mendapatkan kehormatan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) atau di Taman Makam Bahagia (TMB).

Pada laporannya, Dirjen Pothan Pos M. Hutabarat memaparkan, revisi UU No 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI sudah tepat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Banyak kegiatan pembelaan Negara yang dilakukan oleh pejuang, sehingga mereka mendapat penghargaan dan hak mereka sebagai anggota veteran yang telah berjuang membela kemerdekaan yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa.

Pos M. Hutabarat mengusulkan Perubahan pada Bab II Pasal 3, yaitu penambahan veteran perdamaian RI yang merupakan untuk mengadopsi dimana letaknya para pejuang yang berada dibawah komando PBB, "Oleh karena itu, Kami sangat setuju dengan masukan dan menambahkan pasal-pasal," katanya.

Demikian juga Pasal 4 Huruf d, yaitu veteran pembela lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Pre-

siden yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk menambah kriteria veteran, apabila pada masa yang akan datang dapat terjadi kemungkinan penambahan jenis veteran. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlalu sulit untuk mengamandemen UU. "DPR memberikan wewenang otoritas kepada Pemerintah terutama presiden untuk menetapkan jenis veteran lainnya apabila dimungkinkan," usulnya.

Selain itu, Pasal 5 juga ditambahkan bagaimana penjelasan mengenai veteran anumerta RI, selanjutnya sangat setuju perubahan Bab IV Pasal 12 mengenai hak veteran. Veteran pejuang kemerdekaan mendapatkan hak untuk pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP).

"Akan ada penjelasan kriteria TMP dan TMB, pada dasarnya TMP hanya ada satu di kalibata Jakarta. Kriteria pejuang lokal atau pejuang nasional dan dimana tempat meninggalnya, karena ada 360.000 yang masuk kriteria veteran," jelasnya.

Lebih lanjut, menjelaskan, mengenai veteran perdamaian RI, hak pejuang yang diangkat dan ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjuang di mancanegara dalam rangka menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan pembukaan UUD 45 Indonesia berjuang untuk perdamaian dunia.

Menyoroti BAB VII pasal 22, memandang bahwa untuk menghindari terjadinya pemalsuan dan upaya-upaya yang tidak baik dalam rangka penentuan kriteria veteran. Mengusulkan menambahkan pasal 22 dan pasal 23 sebagai ketentuan pidana yang belum ada pada pasal-pasal sebelumnya.

"Apabila seseorang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya untuk veteran, akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 180 juta. Sedangkan Pasal 23, setiap orang yang dengan sengaja menamakan dirinya veteran padahal bukan, akan di-

penjara paling lama 5 tahun dan paling banyak denda 225 juta,” paparnya.

Ketentuan sanksi tersebut sangat penting bagi pemerintah, agar ada kepastian dan juga jangan sampai banyak yang melakukan upaya-upaya untuk mengangkat dirinya sebagai

veteran padahal bukan. Karena dengan peraturan presiden yang terbaru PP No. 23 tahun 2012 tunjangan veteran sudah dinaikan bervariasi antara Rp.1,091 juta sampai Rp.1,224 juta perbulan, yang diberikan kepada para veteran.

“Oleh karena itu, ini merupakan insentif bagi masyarakat yang ingin memperoleh tunjangan tersebut, padahal bukan veteran. Dengan demikian kami mohon persetujuan dari Komisi I untuk memasukan ketentuan pidana tersebut,” usulnya. (as) foto:parle

Workshop Akuntabilitas, Cari Formula Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Sekretariat Jenderal DPR bagian Penanggung Jawab Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas, Program Reformasi Birokrasi Setjen mengadakan Workshop tentang Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR selama dua hari, Senin-Selasa (18-19 /6) di Hotel Santika, Jakarta

Menurut Penanggung Jawab Area Tim Akuntabilitas Setjen DPR RI Helmizar, Workshop ini diselenggarakan dalam rangka terciptanya kesamaan pandangan di kalangan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang juga indikator dari salah satu sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

“Pada saat ini semua kementerian dan lembaga wajib melaksanakan transparansi di bidang kinerja dan di bidang keuangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB” Kata Kepala Biro Keuangan Setjen DPR R ini.

Ia menambahkan, kewajiban lain sebuah lembaga adalah pelaporan keuangan beserta capaian kinerja dan cash planning yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. selain itu, Kementerian dan Lembaga juga diwajibkan memberikan laporan sejenis penyampaian perencanaan keuangan dan cash planning kepada Bappenas.

Deputi Bidang Administrasi Slamet Sutarsono mengharapkan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan segala upaya perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh penghargaan yang sesuai pula dari instansi yang diberikan wewenang untuk memberikan penilaian.

“Diharapkan dengan workshop dan diskusi dapat menemukan sebuah



Kabiro Keuangan DPR Helmizar (kiri) dan Deputi Administrasi DPR Slamet Sutarsono (kanan) pada pembukaan acara workshop Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

konsep sistem penilaian yang sinergis antara akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas anggaran, sehingga tidak terjadi pengulangan kerja, yaitu membuat LAKIP dan membuat laporan Keuangan karena sistim yang berbeda” ungkapnya.

Workshop ini mengundang berbagai kalangan, yaitu perwakilan dari BPK, BPKP, Bappenas dan Kementerian PAN & BR sebagai narasumber. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan BR, Hendro Witjaksana mengatakan, Setjen DPR merupakan lembaga yang khas, yang memang harus mempunyai standar pengukuran tersendiri.

“Dari diskusi tadi terlihat bahwa

Setjen DPR masih terus mengembangkan indikator-indikator ukuran kinerja supaya bisa mengukur kinerjanya sendiri. Dan kemudian nanti soal akuntabilitas dan soal pertanggung jawabannya, pertama memang Setjen DPR harus menghasilkan output-output yang memang wujudnya servis atau dukungan pada dewan,”ujarnya.

Hendro mengingatkan mengenai fungsi yang jelas di berbagai tingkat layanan, baik intern maupun ekstern, kepada masyarakat. “Harus dilihat bahwa antara Dewan dan Setjen ini memang mestinya lebih bersinergi sesuai dengan fungsinya yaitu melayani masyarakat dengan well prepared sehingga dapat berlangsung dengan baik” jelasnya.(ray) foto:ry/parle

Wajar 12 Tahun Tingkatkan Kualitas Siswa

Pemerintah saat ini tengah mencanangkan wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan lulusan SMA. Pasalnya, biaya operasional sekolah dicanangkan 90 persen ditanggung pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri (kanan) saat pertemuan Komisi X DPR dengan Kadis Dikpora Prov.NTB, PGRI, ISPI, Federasi Serikat Guru Indonesia



Jajaran Kadis Dikpora Prov.NTB, PGRI, ISPI, Federasi Serikat Guru Indonesia

“Dalam program ini pemerintah meningkatkan status Wajar pendidikan dasar yaitu SD sampai SMP menjadi SD sampai SMA. Kalau sebelumnya anak-anak Indonesia Wajar 9 tahun hingga tingkat SMP, maka mulai tahun 2013 jadi 12 tahun harus tamat SMA,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bachri saat pertemuan dengan Kadis Dikpora Prov.NTB, PGRI, ISPI, Federasi

Serikat Guru Indonesia beserta jajaran, di ruang rapat Kadis Dikpora, Jum’at (15/6).

Syamsul menambahkan, tahun-tahun sebelumnya wajib belajar hanya 9 tahun cukup sampai tingkat SMP, mulai tahun 2013 pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah universal 12 tahun. “Semua itu dalam rangka meningkatkan angka melanjutkan antar

jenjang pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu,” katanya.

Menurut Syamsul, sejak Wajar 9 tahun diselenggarakan tahun 2004 rata-rata lama belajar anak-anak Indonesia 7,2 tahun, dan sampai tahun 2010 lama belajar anak-anak Indonesia secara rata-rata nasional itu hanya naik menjadi 7,9 tahun. Artinya, peningkatannya kecil sekali dibawah satu digit, sementara di negara-negara lain sudah di atas sepuluh digit. “Tentu ini merupakan hambatan dan tantangan buat kita semua untuk bagaimana angka rata-rata lama belajar anak-anak Indonesia terus harus kita dorong dan kita tingkatkan,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, keinginan menerapkan kebijakan rintisan Wajar 12 tahun didasari juga dari laporan United Nation development Program (UNDP) yang mengatakan, pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia itu berada di urutan 124 dari 187 negara. Artinya, IPM Indonesia menempati ranking yang sangat tidak baik atau masih dibawah. IPM itu tentu diukur dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan, tambahnya.

Dia mengatakan, kita tidak tahu IPM mana yang paling dominan memberikan kontribusi, yang pasti melihat angka lama belajar ini tentu indeks pendidikan memberi kontribusi yang belum terlalu menggembirakan. “Komisi X DPR RI bersama-sama dengan pemerintah terus mencari langkah-langkah bagaimana IPM terus kita perbaiki, lama sekolah anak-anak Indonesia terus meningkat sehingga dengan demikian kita mampu menyediakan tenaga-tenaga yang lebih terdidik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Menurutnya, kita memiliki obsesi Wajar 12 tahun bisa kita diselenggarakan dengan baik, mungkin pada tahun

2015 angka rata-rata sekolah anak-anak Indonesia sudah bisa melampaui sepuluh digit atau sudah berada di atas angka sepuluh dan mungkin bisa mencapai angka 12. "Tentu ini sangat positif bagi kita untuk menyediakan tenaga-tenaga yang semakin terdidik, terampil dan lain-lain sebagainya," paparnya.

Dia menambahkan, Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Rintisan Wajar 12 tahun, Panja ini semata-mata untuk mencari masukan-masukan dan informasi-informasi dari tokoh-tokoh masyarakat pendidikan di daerah, bagaimana respon masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penyelenggaraan Wajar 9 tahun selama

ini. "Kami mencatat bahwa Provinsi NTB relatif lebih maju dan lebih baik penyelenggaraan pendidikannya dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain," paparnya.

Sementara Kadis Dikpora Provinsi NTB, Lalu Syafi'i mengatakan, perlu disusun langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan rencana Wajar 12 tahun (pendidikan menengah universal). Antara lain, inventarisasi kondisi lulusan SMP/MTs yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Analisis kesiapan sarana, tenaga pendidikan dan kependidikan dan dukungan dana penyelenggaraan untuk tiap jenis pendidikan. Sosialisasi kepada masyarakat dan

pemerintah terkait serta tindak lanjut dan pengembangan penyelenggaraan.

Menjawab berapa persen yang harus ditanggung APBN dan berapa persen melalui APBD, Kadis Dikpora menjelaskan, proporsional anggaran 45% dari APBN, 30% dari APBD dan 25% dari dukungan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus berpartisipasi membiayai penyelenggaraan pendidikan karena memang sudah dijamin dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan melibatkan masyarakat agar turut bertanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Proyek Bio Remediasi PT. Chevron Dicurigai Bermasalah

Anggota DPR Komisi VII DPR Agus Sulistyono (F-PKB) menilai, proyek Bio Remediasi PT. Chevron dicurigai bermasalah dan mencemari lingkungan sekitar.

“Sebelumnya KLH telah menetapkan bahwa proyek Bio Remediasi tidak bermasalah dan sesuai aturan. Namun, laporan BP Migas bahwa dana Chevron untuk Bio remediasi ini di suspend (tunda), karena itu Komisi VII DPR akan memperdalam kasus ini dan mempertanyakan kepada KLH mengenai status tersebut,”ujarnya saat diwawancarai Parlemen, sesuai Kunjungan spesifik Tim Komisi VII DPR ke Pekanbaru, meninjau proyek bio remediasi dan dugaan pencemaran limbah Chevron, di Jakarta, Senin, (18/6).

Menurutnya, fakta dilapangan Bio remediasi membuat tanah sekitar tercemar hingga akhirnya masyarakat melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan pencemaran itu. Karena itu, lanjutnya, Komisi VII DPR akan memanggil BP Migas, PT Chevron Pacific Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait proyek bio remediasi yang diduga merugikan negara sekitar Rp. 200 Miliar. “Kita akan segera memanggil BP Migas, Chevron dan KLH guna memperdalam kasus bio remediasi ini,”ujarnya

Agus mengatakan, tujuan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekanbaru khususnya ke Chevron yaitu me-



Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono saat diwawancarai oleh Parle mengenai limbah Chevron

lihat langsung pencemaran limbah B3 PT Chevron dan proyek Bio remediasi

Dia menambahkan, Komisi VII DPR akan melakukan identifikasi dan jika memang harus dipanggil masyarakat sekitar nanti akan dipanggil guna menyampaikan fakta-faktanya kepada Komisi VII DPR. “Proyek Bio Remediasi Chevron dibiayai oleh negara dari dana cost recovery, BP Migas menyampaikan bahwa dana sekitar 32 Juta US Dollar, itu masih di suspend karena itu memang ada masalah terkait bio remediasi,”paparnya.

Seperti kita ketahui, Bioremediasi

merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, dimana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. (si)/foto:iw/parle.

Persoalan Pendidikan Harus Tersentralisasi

Anggota Komisi X DPR RI Harbiah Salahuddin mengatakan, persoalan pendidikan jangan diotonomikan. Pasalnya, pendidikan di daerah kadang-kadang terpengaruh kebijakan kepala daerahnya, belum kebijakan DPRDnya, hal ini menimbulkan beberapa kebijakan yang kadangkala tidak mendukung kondisi pendidikan, dimana sangat tergantung taste kepala daerah.



Anggota Komisi X DPR Harbiah Salahuddin (kiri) saat kunjungan kerja Tim Panja Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Komisi X DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

“Di pusatkan saja sehingga kebijakannya itu satu. Kalau pusat yang pegang satu kebijakan, satu pintu itu lebih baik,” kata Harbiah saat kunjungan kerja Tim Panja Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Komisi X DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/6).

Ironisnya, Harbiah menambahkan, ada satu daerah ketika Pilkada dimana kepala dinas pendidikan tidak ikut menjadi tim suksesnya, begitu kepala daerah itu jadi maka kepala dinas pendidikan itu langsung digantikan oleh kepala pemukiman, karena tidak ada yang cocok untuk menjadi kepala dinas pendidikan. “Ini terjadi di daerah kami, bukan di NTB,” jelasnya.

Semoga rintisan Wajar 12 tahun ini kedepan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya anak bangsa kita, dan TKI maupun TKW yang bekerja di luar negeri bisa bersaing dan bisa mendapatkan penghargaan yang wajar karena pendidikannya yang sudah tinggi.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bachri mengatakan, sebentar lagi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi akan disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi Undang-Undang. Intinya mewajibkan negara agar biaya seleksi masuk perguruan tinggi negeri gratis. “Anak-anak tidak lagi membayar saat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi

negeri,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, apabila mereka lulus dari seleksi perguruan tinggi negeri mereka wajib diterima di perguruan tinggi tersebut tanpa harus ada alasan tidak bisa membayar. Jadi anak-anak kita dengan potensi akademik yang baik lulus seleksi SPTN dia wajib diterima di perguruan tinggi negeri. “Itu amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” jelasnya.

Dia menambahkan, apabila dia sudah menjadi mahasiswa ternyata dalam perjalanannya mengalami kesulitan pembiayaan, itu juga tidak boleh dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri sebab itu amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi, lanjutnya, wajib mencari cara bagaimana anak ini bisa menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi negeri tersebut. “Tidak boleh di Drop Out (DO) dengan alasan tidak mampu membayar atau alasan apapun di perguruan tinggi tersebut, itu amanat yang kita tuangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” ujarnya.

Apabila Wajar 9 tahun berhasil dengan baik, paparnya, diharapkan mampu mendorong anak-anak Indonesia bisa mencapai tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan tidak semata-mata karena alasan ekonomi tapi alasan-alasan akademik. “Kita akan mendorong pendidikan ini kearah yang lebih baik,” katanya.

Dia mengharapkan, Wajar 12 tahun bisa diselenggarakan dengan baik pada tahun 2013. “Kami mengharapkan apabila di daerah-daerah ada hambatan maupun kendala-kendala tolong melalui Kadis Dikpora Provinsi NTB bisa menyampaikan secara langsung ke Komisi X DPR RI,” katanya.(iw)/foto: iw/parle.

Penataan Kawasan Ciliwung Perlu Perencanaan Komprehensif

Komisi V DPR RI mendukung program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menata pemukiman kawasan Ciliwung. Agar program tersebut mencapai sasaran, Komisi V berharap perencanaannya betul-betul komprehensif, realistis sehingga matang.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Ali Wongso dalam rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Kamis sore (14/6), yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

Ali Wongso mengatakan, program ini terkait dengan Direktif Presiden dan penugasan khusus, yang salah satunya penanganan Ciliwung.

Menurutnya, program ini menyangkut lintas kementerian termasuk juga dukungan dari Pemerintah daerah. Untuk itu dia mengusulkan Komisi V DPR juga mengundang menteri lain yang terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, PT. Cipta Karya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Sosial dan tentunya Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sehingga program yang akan dijalankan betul-betul berlaku efektif.

“Kita semua tentunya sependapat agar program Kementerian Perumahan ini bisa berjalan efektif, mencapai sasaran dan dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya..

Menyinggung masalah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Ali Wongso mengatakan, spek teknis daripada rusunawa itu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dari warga masyarakat.

“Jika memang lebih sesuai tiga lantai atau bahkan dua lantai, tidak perlu dipaksakan empat lantai, sepanjang melalui analisis yang obyektif,” tambahnya.

Karena jika sebuah perencanaan tidak match dengan kebutuhan, dikawatirkan pembangunan rusunawa tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. Dia juga berharap lokasi-lokasi rumah susun betul-betul ada kepastian dan betul-betul mencapai sasaran yang membutuhkan dalam skala prioritas termasuk penyebarannya di

tanah air.

“Kami berharap Kementerian Perumahan Rakyat mengkaji supaya match dengan kebutuhan yang menggunakannya. Jadi ibarat kita akan membantu jangan tanggung-tanggung, kalau kebutuhannya 99 unit di dalam satu rumah susun, jangan jumlah yang dibangun hanya 79 atau 69 tapi biarlah sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Wongso juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan Rakyat dan jajarannya yang telah enam kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Komisi V berharap, keberhasilan ini dapat memicu jajaran Kementerian Perumahan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasinya. Karena WTP ini akan sangat berarti dan dirasakan masyarakat apabila sekaligus bermakna bagi percepatan

pemenuhan kebutuhan rakyat akan tempat tinggal yang layak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 28 huruf h.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, Rencana Kerja Kemenpera berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 diantara program prioritas salah satunya adalah penanganan Ciliwung (pembangunan Rusun Sewa).

Program ini, kata Djan, lanjutan dari Tahun 2012, dengan total kebutuhan 44 tower dengan dana Rp 5,8 triliun.

Program ini termasuk Direktif Presiden dan penugasan khusus, selain penanganan Waduk Jatigede, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat juga Program Pro Rakyat Klaster IV, yaitu Program rumah sangat murah dan rumah murah (tt)foto: wy/parle



Anggota Komisi V DPR Ali Wongso saat rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya

Kemenpera Perlu Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan prasarana, sarana dan utilitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK atas program ini mengindikasikan banyaknya kelemahan dalam tata kelola program ini.



Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya

Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Kamis sore (14/6) di gedung DPR.

Yasti mengatakan, evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat mendorong Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperbaiki tata kelola program tersebut di masa yang akan datang baik menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2011, Komisi V DPR mempertanyakan bagaimana sebenarnya konsep stimulan dalam program bantuan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) di Kementerian Perumahan Rakyat.

Kejelasan konsep stimulan dalam program bantuan PSU di Kemenpera ini, kata Yasti, diharapkan dapat menstimulasi pemerintah daerah melahirkan program-program sejenis di daerah mereka.

Sesuai dengan agenda rapat, ada

beberapa hal yang perlu digarisbawahi Komisi V DPR dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) di Tahun 2013. Hal tersebut adalah Program peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah, terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan mengembangkan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh.

Hal berikutnya adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 121 twin blok untuk TNI dan POLRI, buruh di Jabodetabek, mahasiswa, pondok pesantren serta kawasan kumuh Ciliwung, fasilitasi pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman bagi 36.120 unit rumah serta fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya sebanyak 15.000 unit.

Komisi V DPR ingin mendengar penjelasan yang spesifik terkait de-

ngan rencana kerja dan anggaran Kemenpera untuk mendukung rencana kerja pemerintah pada tahun anggaran 2013.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, selama enam tahun berturut-turut, opini BPK terhadap laporan keuangan Kemenpera dari tahun 2006 – 2011 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat ini, katanya, menjadi dorongan jajaran di kementeriannya untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

Hasil pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2011 terdapat 45 temuan, yang telah dinyatakan tuntas temuan itu sebanyak 38 kasus, 14 kasus belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut dan hanya satu kasus yang belum ditindaklanjuti.

Djan menambahkan, landasan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Kemenpera tahun 2013 adalah Program Pro Rakyat Klaster IV, Program rumah sangat murah dan rumah murah, penanganan Ciliwung, penanganan waduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).

Untuk memenuhi target RPJMN 2010-2014, Direktif Presiden dan Penugasan Khusus, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 17,6 triliun. Pagu indikatif sesuai SEB Menkeu dan MENPPN Rp 4,8 triliun, Rancangan Rencana Kerja Kemenpera 2013 berdasarkan RKP Tahun 2013 sebesar Rp 5,1 triliun.

Dalam hal ini, Kemenpera masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun. Kemenpera telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ini melalui Surat Menteri Perumahan Rakyat No. 171/M/KU.01.01/05/2012. (tt)foto:wy/parle

Komisi IX Desak Dirjen Binapenta dan BNP2TKI Bina Konsorsium Asuransi TKI

Komisi IX DPR mendesak Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk meningkatkan pembinaan terhadap konsorsium asuransi dalam memberikan perlindungan para TKI dengan menitik beratkan integritas data dan teknologi informasi perlindungan calon TKI dan TKI.

“Selama ini Pemerintah selalu mengatakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pahlawan devisa, namun pada kenyataannya semua ini hanya merupakan simbol belaka. tanpa perlindungan yang memadai” ungkap Anggota Komisi IX DPR Endang Agustin Sarwan Hamid saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Dirjen Binapenta, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/6) sore.

Endang Agustin juga mempertanyakan, bagaimana selama ini pemerintah menyikapi tentang para TKI yang dianggap sebagai pahlawan devisa, termasuk pelayanan yang memadai terhadap para TKI dari Kementerian yang bersangkutan.

Dia meminta Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Binapenta, dan Kepala BNP2TKI untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga masing-masing, dalam penempatan dan perlindungan yang optimal kepada TKI.

Komisi IX DPR mendesak, agar Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk memberikan fasilitas kepada Konsorsium Asuransi dalam membuka perwakilan asuransi luar negeri terkait dengan perlindungan asuransi TKI di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Anggota Komisi IX DPR Endang Agustin mengatakan, jika dari ketiga kementerian atau Lembaga yang terlibat langsung dengan masalah TKI ini, dan mereka tidak mempunyai perasaan serta konsep yang sama mengenai pahlawan TKI ini, dipastikan ma-



Anggota Komisi IX DPR Endang Agustin Sarwan Hamid (tengah) saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Dirjen Binapenta, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu.



Jajaran Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Binapenta, dan Kepala BNP2TKI saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR

salah selalu berulang dan tidak akan ada penyelesaiannya.

Sementara Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Tatang Razak mengatakan, bahwa perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) sudah mengantisipasi dan perlu mendapat perhatian yang serius, maka perlu dibentuk Direktorat Perlindungan warga Indonesia, yang menjadi prioritas utama di Kementerian Luar Negeri.. (Spy) foto:wy/parle

Komisi II DPR setuju Pagu Anggaran Kemendagri Rp. 15 triliun

Komisi II DPR menyetujui jumlah pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.005 triliun.



internetbisnis.kki.com

Kondisi di daerah perbatasan



Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sutrisno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/6).

“Namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR,” kata Taufik.

Usulan dan masukan itu, tambahnya, terkait dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yakniantisipasi akan terselesaikannya UU, peningkatan peran organisasi kemasyarakatan

dalam rangka peningkatan pendidikan politik di daerah, Pembinaan dan pengembangan kawasan dan pertahanan, Pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, dan Penyelenggaraan otonomi khusus.

Dalam kesimpulan lainnya, jelas Taufik, terkait pagu indikatif BNPP TA 2013 sebesar Rp. 273 miliar lebih, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu yang diusulkan, namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR meminta BNPP untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, terutama yang berkaitan dengan pembangunan in-

frastruktur dan sarana prasarana di kawasan perbatasan, serta penyelesaian desain besar yang berbasis lokasi prioritas (kecamatan).

“Terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan dan Program e-KTP termasuk usulan tambahan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 512 miliar, Komisi II DPR dan Kemendagri menyepakati untuk dilakukan Rapat Kerja dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran program tersebut.

Sebelumnya Sekjen Kemendagri Diah Anggraini menjelaskan proporsi rencana alokasi anggaran Kemendagri dalam RAPBN tahun 2013 sebesar Rp. 15.005 triliun salah satunya meliputi, alokasi anggaran terbesar pada kegiatan nasional PNPM sebesar 67,23 persen atau Rp. 10,088 triliun, sementara untuk berbagai kegiatan prioritas

nasional, prioritas bidang, dan prioritas KL serta mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai mandate ketentuan perundang-undangan proporsinya sebesar 32,77 persen atau Rp.4,917 triliun.

Selanjutnya menurut, Sekretaris BNPP Sutrisno, menjelaskan, pagu in-

dikatif BNPP tahun 2013 sebesar Rp. 273 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp. 25 miliar atau naik 10,07 persen dari alokasi anggaran BNPP tahun 2012 yang sebesar Rp. 248 miliar.

Sutrisno menambahkan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2013, dan sebagai

bentuk komitmen BNPP untuk mempercepat pembangunan dikawasan perbatasan, BNPP mengalokasikan anggaran untuk daerah yang besaran anggarannya akan diupayakan untuk terus bisa naik dari tahun ke tahun secara bertahap.(nt) foto:wy/parle

Komisi II DPR Tinjau Persiapan Calon Pemekaran 2 Kabupaten Di Sumsel

Komisi II DPR melakukan peninjauan calon pemekaran dua Kabupaten di Sumsel guna memantau kesiapan baik teknis, fisik maupun administratif.

Komisi II DPR melakukan peninjauan calon pemekaran dua Kabupaten di Sumsel guna memantau kesiapan baik teknis, fisik maupun administratif.

“Kedua daerah ini secara teknis, fisik, dan administratif sudah memenuhi kriteria dan layak sebagai daerah pemekaran. Namun masih ada yang harus diselesaikan seperti permasalahan batas wilayah di daerah Muratara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini tengah berselisih paham terhadap kepemilikan Suban IV dengan Kabupaten Musi Rawas,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, dalam rapat pembahasan persyaratan dan persiapan pemekaran Kabupaten Pengungkal Abab Lintang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara) di Provinsi Sumatera Selatan.(15/5)

Ganjar Pranowo menambahkan, permasalahan batas wilayah merupakan hal yang sangat prinsip, jangan sampai kedepan terjadi konflik pasca pemekaran. Pelaksanaan pemekaran harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. “Banyak daerah pemekaran terjadi konflik disebabkan beberapa faktor seperti adanya konflik lokal, ada pihak yang sengaja menunggangi wilayah tersebut dengan didasari untuk mensejahterakan masyarakat,”ujarnya saat rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Eddy Yusuf, Ketua Presidium Pemekaran Muratara, Unsur Muspida Sum-



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dalam rapat pembahasan persyaratan dan persiapan pemekaran Kabupaten PALI dan Muratara Provinsi Sumatera Selatan

sel dan Dinas terkait.

Sementara Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki kedua daerah pemekaran tersebut, dinilai pantas untuk dijadikan Kabupaten baru, karena persyaratan dasar yang harus dipenuhi dengan baik seperti di daerah Muratara, terdapat tujuh Kecamatan, 83 Desa, dan 179.332 penduduk, sedangkan di daerah PALI terdapat lima Kecamatan, 66 Desa, dan 179.834 penduduk.

Terkait dengan batas wilayah Muratara, Eddy Yusuf mengatakan, persoalan tersebut tidak ada masalah lagi karena batas wilayah yang melibatkan Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas sebagai Kabupaten induk Mu-

ratara sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Rombongan Komisi II DPR RI juga melakukan peninjauan langsung melihat kesiapan pelaksanaan pemekaran kabupaten Pali di Muaraenim dan Muratara, di Musirawas. Ikut serta Dalam kunjungan Lapangan Komisi II DPR RI di dua Kabupaten Pengungkal Abab Lintang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan tersebut beberapa orang anggota. Rusminiati (FPD), Eko Sarjono Putro dan Azhar Romli (F-PG), Zainun Ahmadi (F-PDI P), H. Nu'man Abdul Hakim (F-PPP), KH. Muhammad Unais Ali Hisyam (F-PKB) Dan Hj. Mestariyana Habie (F-Gerindra). (Ton/TVP)

RUU P2H Berikan Perlindungan Bagi Kawasan Hutan

Komisi IV DPR RI tengah menggodok RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). Pasalnya, banyak sekali tambang-tambang liar yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tentunya tidak mudah kita untuk memberantasnya.



Suasana rapat pembahasan RUU P2H Komisi IV DPR



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

Hal pokok yang disoroti didalam RUU itu, diantaranya mengenai eva-luasi izin pinjam kawasan hutan. “Ini sebagai test case untuk melihat sejauhmana izin-izin pinjam pakai ini dimanfaatkan secara baik, apakah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang benar yang kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron saat ditemui tim parle di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/6).

Herman menambahkan, DPR sedang membahas RUU yang dulu namanya pencegahan pemberantasan pembalakan liar (P3L) yang sekarang diubah menjadi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). “Kalau dalam RUU P3L kita ingin berantas pembalakan liarnya, sementara dalam RUU P2H ini fokus kepada bagaimana hukum itu berlaku untuk pembalakan-pembalakan liar dan terhadap perusahaan-perusahaan berizin yang tidak memenuhi standar lingkungan yang benar,” tuturnya.

Menurutnya, RUU P3L isinya mengatur bagaimana undang-undang atau norma-norma dapat memberikan sanksi keras terhadap para pembalakan. “bukan saja orang yang sudah memotong kayu tapi orang yang berniat memotong kayu dengan membawa peralatan pemotong kayu kehutan itu sudah merupakan barang bukti bahwa dia akan melakukan pembalakan liar,” ujarnya.

Dia menambahkan, kayu yang sudah diproduksi dan berubah bentukpun apabila bagian dari kegiatan

pembalakan liar akan mendapatkan sanksi hukum. Sedangkan dalam RUU P2H selain memberikan sanksi terhadap para pembalakan liar yang merusak hutan juga berlaku sanksi bagi para pejabat yang membiarkan terjadinya pembalakan liar.

“Dia akan mendapat hukuman 1,5 kali lipat dibandingkan masyarakat biasa. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan berizin yang tidak melakukan kegiatan usahanya dengan baik akan dikenakan sanksi hukuman karena merusak hutan,” jelasnya.

Herman mengharapkan RUU P2H dapat menjadi alat atau aturan yang dapat membuat jera para pelaku illegal logging atau pun kepada perusahaan-perusahaan berizin yang tidak melakukan usahanya dengan baik yang berakibat merusak lingkungan maupun merusak hutan.

“Tentunya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa menekan laju deforestasi dari 4 juta hektar hutan per tahun menjadi 1 juta hektar hutan per tahun dengan kemampuan merehabilitasi 500 ribunya. Paling tidak dapat mengeliminasi atau mengurangi laju deforestasi sambil membesarkan ataupun meluaskan laju rehabilitasinya,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah harus segera menertibkan penambang-penambang liar, tentunya juga bagi penambang berizin namun tidak menjalankan standar lingkungan yang benar. “Apakah mereka sudah melakukan standar operasional prosedur (SOP) yang benar, ini harus dikaji. Jadi jangan sampai kita fokus untuk menertibkan penambang-penambang liar tetapi penambang-penambang ataupun penguasa hutan yang berizin melakukan perusakan juga,” ujarnya. (iw). foto: iw/parle.

Pimpinan DPR Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU Jabatan Notaris

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Priyo Budi Santoso menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Nama ketua dan wakil ketua pansus tersebut adalah Andi Rio Indris Padjalangi (F-PG) sebagai ketua; Harry Witjaksono (F-PD), Sayed Muhammad Muliady (F-PDI Perjuangan), dan Dim-yati HA. Natakusumah (F-PPP) sebagai wakil ketua pansus.

“Nama Ketua dan Wakil ketua pansus tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat usulan dari fraksi-fraksi DPR RI,” ujar Priyo saat memimpin rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/6).

Menurutnya, pimpinan pansus itu adalah kolektif dan kolegial yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua berdasarkan proporsional. “Alhamdulillah, pemilihan dan penetapan ketua dan wakil ketua pansus tersebut ini tidak lewat voting tapi melalui mekanisme lewat musyawarah mufakat,” tuturnya.

Dia menambahkan, jumlah pansus yang sudah DPR kerjakan per hari ini ada 16 pansus dari 70-sekian RUU yang segera dibahas. Dari 16 pansus itu Fraksi Partai Demokrat mendapat 4 ketua dan 12 wakil ketua. Fraksi Partai Golkar mendapat 4 ketua dan 12 wakil ketua. Fraksi PDI Perjuangan 3 ketua dan 13 wakil ketua. Fraksi PKS 2 ketua dan 8 wakil ketua. Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB masing-masing 1 ketua. Fraksi Partai Gerindra dapat 1 wakil ketua, sementara Fraksi Partai Hanura sampai saat ini masih kosong. “Itulah rekapitulasi mengenai jabatan-jabatan ketua dan wakil ketua yang ada di 16 pansus yang sudah dipegang selama ini,” jelasnya.

Priyo mengharapkan pansus dapat selesai sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan dua kali masa persidangan. Pimpinan DPR akan memberikan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) saat penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Jajaran Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

keluasan satu masa sidang lagi kalau memang ada yang klausial, tapi saya berharap dan menyakinkan Pansus RUU ini dua kali masa persidangan bisa selesai. “Karena RUU ini pasal-pasal krusialnya mungkin tidak serumit RUU tentang Pemilu,” tambahnya.

Dia menambahkan, sebelum meneruskan ke acara serah terima palu dari pimpinan kepada ketua dan wakil ketua pansus, saya menanyakan kepada para anggota pansus dari seluruh unsur fraksi yang berada di pansus ini, apakah dapat diterima dan disetujui Andi Rio In-

dris Padjalangi sebagai ketua; Harry Witjaksono, Sayed Muhammad Muliady, dan Dimiyati HA. Natakusumah sebagai wakil ketua pansus? “Setujuuu.....!!!” serentak teriak anggota pansus.

“Alhamdulillah,” tutur Priyo sambil mengetuk palu pimpinan secara resmi sebagai bentuk persetujuannya. Kemudian acara serah terima palu pimpinan dari Wakil Ketua DPR/Korpolkam Priyo Budi Santo kepada ketua pansus Andi Rio Indris Padjalangi didampingi tiga wakil ketua pansus.(iw) foto: iw/parle.



Ketua DPR Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Irak untuk Indonesia HE. Mr Ismieal Shafiq Muhsin, di Ruang Kerja Ketua DPR Kamis (7/6). foto:IW



Ketua DPR Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia HE. Mr Garjit Singh, di Ruang Kerja Ketua DPR Selasa (12/6), foto:IW



Penyerahan Palu Pimpinan Pansus RUU Jabatan Notaris dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Ketua Pansus Andi Rio Idris Padjalangi, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/6). foto:IW



Pengukuhan Jazuli Juwaini menggantikan Surahman Hidayat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, disaksikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah di Ruang Rapat komisi, Kamis (21/6). foto:RY



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima Delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste yang di pimpin oleh Mr. Joarui Amaral, di ruang rapat Sekjen, Kamis (21/6), foto: IW



Tim Pengawas Aceh-Papua melakukan audiensi dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, dipimpin Yorris Raaweyai, di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (21/6), foto: IW